



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS - PK

PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya penyusunan Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan & Koordinasi PIS-PK dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban tim mengenai proses pertemuan evaluasi tersebut kepada Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dan pihak-pihak yang terkait. Dalam laporan ini akan diuraikan langkah-langkah kegiatan sampai terlaksananya kegiatan tersebut.

Penyusunan Laporan Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan & Koordinasi PIS-PK ini terlaksana berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami ucapkan terima kasih. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dari laporan ini. Oleh karena itu segala masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan.

Jakarta, Desember 2018
Ketua Penyelenggara
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dra. Euis Maryani, M.Kes
NIP. 196406071988022001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati setiap tanggal 12 November, baik ditingkat pusat maupun daerah. Tema Hari Kesehatan Nasional tahun 2018 hampir sama dengan tema HKN 2011, yaitu “Aku Cinta Sehat”, sedangkan pada tahun 2011 lalu adalah, "[Indonesia Cinta Sehat](#)." Sedangkan subtema HKN 2018 adalah, “Ayo Hidup Sehat, Mulai Dari Kita”.

"Ayo hidup sehat, mulai dari kita merupakan slogan yang harus kita gaungkan dan laksanakan sebagai insan kesehatan. “Mulai dari kita” akan dapat mengubah wajah kesehatan Indonesia apabila dilakukan oleh seluruh masyarakat di negeri ini," hal ini sejalan dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga untuk mengubah upaya kesehatan bersifat kuratif menjadi preventif dan promotif. Mengubah gaya hidup menjadi hidup sehat dimulai dari diri sendiri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selain itu kementerian kesehatan mengajak seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup, menkes juga menghimbau masyarakat agar membiaskan diri mengonsumsi beragam sayur dan buah nusantara. Makan sayur dan buah merupakan salah satu upaya perilaku hidup sehat yang saat ini kita galakkan dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)."

"Masyarakat yang sehat merupakan modal ketangguhan suatu bangsa. Keterlibatan seluruh komponen bangsa, mencakup pemerintah, swasta,

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

dan masyarakat dibutuhkan baik di pusat maupun daerah. Saya mengharapkan kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyosialisasikan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan dan memperkenalkan program-program kesehatan guna mendapatkan dukungan politis serta dukungan sumber daya dari seluruh jajaran Pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan Pertemuan ini adalah untuk meningkatkan Sinergisitas pemerintah pusat dan daerah khususnya bidang kesehatan melalui pelaksanaan pelatihan dengan menggunakan dana dekonsentrasi guna implementasi PIS-PK dalam mendukung Kinerja urusan kesehatan pemerintah dan menyongsong era Revolusi Industri 4.0

1.2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Kegiatan Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan dan Koordinasi PIS-PK untuk menyampaikan evaluasi kinerja pelatihan SDM Kesehatan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi melalui institusi terakreditasi Balai Pelatihan Kesehatan.

B. TUJUAN

Mewujudkan penyelenggaraan pelatihan yang efektif mengacu pada kurikulum dan pedoman guna mewujudkan SDM Kesehatan yang berkualitas dalam mendukung implementasi PIS-PK untuk Indonesia sehat.

1.4. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan dan Koordinasi PIS-PK ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

pada tanggal 15 – 17 November 2018. Adapun tempat pelaksanaan yaitu di **Bali Dynasty Resort**, Jalan Kartika, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 Telepon: (0361) 752403

1.5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan dan Koordinasi PIS-PK dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan :
 - a. Persiapan administrasi.
 - b. Persiapan koordinasi.
2. Penyiapan bahan dan narasumber.
3. Pelaksanaan workshop dengan peserta berasal dari
 - a. Badan PPSDM Kesehatan
 - b. Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
 - c. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
 - d. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
 - e. Dinas Kesehatan Provinsi di 34 Provinsi,
 - f. Balai Besar Pelatihan Kesehatan,
 - g. Balai Pelatihan Kesehatan UPT Kementerian Kesehatan,
 - h. Balai Pelatihan Kesehatan Daerah di 34 Provinsi
4. Pelaporan hasil pertemuan koordinasi

1.6. PENANGGUNG JAWAB DAN PENERIMA MANFAAT

- A. Penanggung Jawab
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
- B. Penerima Manfaat
Kegiatan Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan dan Koordinasi PIS-PK adalah seluruh Dinas Kesehatan dan UPT penyelenggara Pelatihan di seluruh Indonesia

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

1.7. JADWAL KEGIATAN

Berikut jadwal Kegiatan Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan dan Koordinasi PIS-PK:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	PEMBICARA
Kamis, 15 November 2018	15.00 - 17.00	Registrasi	Panitia
	17.00 - 19.00	ISHOMA	
	19.00 - 19.30	Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Panitia • Pembukaan, arahan sekaligus membuka 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan • Kepala Pusat SDM Kesehatan
	19.30 - 20.30	1. Implementasi PIS-PK dalam mendukung Kinerja Urusan Kesehatan Pemerintah 2. Implementasi PIS-PK Prov Bali	Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
	20.30 - 22.30	1. Evaluasi Kinerja pelatihan Bidang Kesehatan 2. Penyelenggaraan Pelatihan PIS-PK tahun 2018	Inspektur 4 Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan
Jum'at, 16 November 2018	08.00 - 10.00	1. Standar Kompetensi Teknis 2. Kebijakan Pelatihan Bidang Kesehatan	Kepala Bidang Analisis Kompetensi dan Pemetaan Kebutuhan Pelatihan Kepala Pusat Pelatihan SDM

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	PEMBICARA
			Kesehatan
	10.00 - 10.15	Coffee Break	
	10.15 - 12.15	Akreditasi Pelatihan dan Akreditasi Institusi Bidang Kesehatan	Kepala Bidang Pengendalian Mutu
	12.15 - 13.00	ISHOMA	
	13.00 - 16.00	Pengembangan Kompetensi Tenaga Puskesmas di Era Revolusi Industri	Kepala Badan PPSDM Kesehatan
	16.00 - 16.15	Coffee Break	
	16.15 - 18.15	Evaluasi Kinerja Pelatihan SDM Kesehatan Bersumber Dana Dekonsentrasi	Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
	18.15 - 19.15	ISHOMA	
	19.15 - 21.15	1. Sosialisasi Penyelenggaraan Ujian Komprehensif Pelatihan Manajemen Puskesmas 2. Evaluasi Data Pelatihan	Kepala Sub Bidang Pengembangan Pelatihan Teknis Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	21.15 - 22.30	Diskusi terkait data pelatihan bersumber dana dekonsentrasi dan Rencana Tindak Lanjut	Panitia
Sabtu, 17 November 2018	08.00 - 09.00	Penutupan	Kepala Pusat SDM Kesehatan
	09.00 - 10.00	Penyelesaian Administrasi	Panitia

BAB 2

PELAKSANAAN KEGIATAN

1.1. RAPAT PERSIAPAN

Guna kelancaran dan keberhasilan kegiatan Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan dan Koordinasi PIS-PK, diperlukan rapat persiapan di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan. Rapat persiapan tersebut dilaksanakan pada tanggal Oktober 2018 di kantor Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

NOTULENSI RAPAT :

- Dibuka oleh Bapak Nusli Imansyah, SKM, M.Kes
- Persiapan teknis dan persiapan administratif
- Persiapan teknis meliputi :menyiapkan laporan ketua panitia pembukaan dan penutupan, sambutan pembukaan dan penutupan, memastikan narasumber yang akan hadir, menyiapkan bahan dan materi yang akan disajikan, merancang desain ruang pertemuan (desain round table), menyiapkan acara, membuat notulen.
- Persiapan administrasi : Pemesanan hotel, ruang pertemuan, ruang vip, kamar hotel dan penjemputan pejabat terkait dan narasumber, daftar hadir peserta, daftar KIT, penyiapan ATK, Kit dan Bahan penyelesaian SPJ, membagi tugas, untuk tugas dikelas dan diluar kelas, dokumentasi, menyiapkan pointer, laptop dan media penyajian

1.2. SURVEY LOKASI

Survey ke Bali Dynasty Resort oleh Tim Tata Usaha untuk melihat kesiapan dan sekaligus rapat persiapan akhir Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan PIS-PK. Pertemuan dengan Pihak marketing yang diwakili oleh ibu Dyah sekaligus Survey lokasi ini dilakukan untuk

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

memastikan kondisi ruangan mulai dari pintu masuk, pintu keluar, ruangan registrasi, ruang penitipan sekretariat, ball room untuk rapat, ruang VIP, ruang makan VIP serta fasilitas yang tersedia seperti panggung, sound system, meja dan kursi termasuk setting ruangan. Seluruh fasilitas dan ruangan yang di minta oleh Panitia Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sudah dipastikan tersedia dan marketing pihak bali Dynasty Resort sudah bersedia untuk memenuhinya.



1.3. ACARA PEMBUKAAN

2.2.1 REGISTRASI PESERTA

Sebelum acara pembukaan Peserta melakukan registrasi dengan mengisi daftar hadir di meja panitia. Panitia menyediakan meja registrasi sebanyak 3 meja yang berada di pintu masuk *Ball Room* Hotel.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**



2.2.2 PEMBUKAAN

Dalam acara pembukaan dipandu oleh Master of ceremony (MC).

2.2.3 LAPORAN KETUA PANITIA

Laporan Ketua Panitia oleh Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan, acara pelaksanaan pertemuan Evaluasi penyelenggaraan Pelatihan SDM kesehatan dan Koordinasi PIS-PK dalam rangka mensinkronkan data pelatihan dan persiapan untuk pelatihan di tahun 2019, dengan mengundang seluruh dinas kesehatan provinsi yang terdiri dari SDK, Bapelkes Daerah, dan tim Perencana/ Monitoring. Selain itu mengundang dari BBPK/ Bapelkes UPT Badan PPSDM Kesehatan. Selanjutnya bapak Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang akan membuka kegiatan ini.

2.2.4 SAMBUTAN KEPALA PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

Pembukaan dan arahan dari Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Bapak **dr. Achmad Subagjo Tancarino, MARS.**



Kepala Pusat Pelatihan menyampaikan bahwa dalam rangka masih pada bulan November sebagai insan kesehatan kami ucapkan: **SELAMAT HARI**

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

KESEHATAN NASIONAL, AYO HIDUP SEHAT, MULAI DARI KITA dan saya tambahkan **MULAI DARI SEKARANG**, tentu sangat berkaitan dengan pertemuan ini yang melaksanakan pelatihan prioritas nasional mengedepankan promotif dan preventif.

Kita tinggalkan sejenak hiruk pikuk terkait perayaan HKN, adapun Pertemuan ini diharapkan memperoleh hasil dari pelaksanaan pelatihan bersumber dana dekonsentrasi dan penggunaan dana APBN untuk percepatan pelaksanaan pelatihan prioritas. Setiap kegiatan tentu harus ada penilaian secara menyeluruh dan terus menerus agar ada proses perbaikan pada setiap tahapannya.

Adapun tujuan pertemuan ini **pertama** Mengetahui gambaran penggunaan anggaran dekonsentrasi baik secara kualitas dan kuantitas, **kedua** Mengetahui gambaran pelatihan yang dilaksanakan baik, input, proses dan kendala atau hambatan yang dihadapi penyelenggara terkait teknis pelatihan, **ketiga** Memberikan informasi terkait kebijakan kebijakan baru baik penggunaan anggaran maupun mekanisme kegiatan pelatihan. Pada saat ini telah hadir peserta yang berasal dari 34 propinsi.

Harapan dari pertemuan ini adalah adanya tukar informasi tentang hambatan, kendala dan perbaikan yang telah dilakukan sehingga provinsi lain dapat menduplikasi serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan sehingga terbina hubungan yang harmonis dan terintegrasi satu dengan yang lain.

1.4. PEMAPARAN HARI PERTAMA

Narasumber yang mengisi hari pertama kegiatan Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan dan Koordinasi PIS-PK ini yaitu:

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**



1. drg. Saraswati, MPH, (Direktur Pelayanan Kesehatan Primer) menyampaikan

Melalui pelaksanaan PIS-PK kita dapat mewujudkan Keluarga Sehat yang tergambar dalam Indeks Keluarga Sehat (IKS). IKS dapat diperoleh untuk setiap tingkatan wilayah, yang dapat menggambarkan status kesehatan mulai dari Rukun Tetangga (RT) sampai tingkat Nasional.

Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran kondisi kesehatan yang sesungguhnya, maka pelaksanaan kunjungan keluarga harus segera mencapai *total coverage*.

Dalam tahap persiapan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Puskesmas perlu melakukan **integrasi program, SDM dan pendanaan**. Puskesmas melakukan integrasi terhadap seluruh **upaya/program** yang akan dilakukan, sehingga kunjungan keluarga yang dilakukan melalui pendekatan akan meningkatkan capaian setiap program yang ada. Misalnya di Puskesmas Soasio, Kota Tidore Kepulauan, kunjungan keluarga dilaksanakan terintegrasi dengan program kusta dan di Papua Barat dengan program malaria (identifikasi penggunaan kelambu), karena masalah kesehatan tersebut merupakan masalah kesehatan *local specific* utama di daerah tersebut.

Diperlukan integrasi **SDM** dalam upaya pengaturan atau pengorganisasian secara internal Puskesmas. Puskesmas menetapkan tim pembina Keluarga yang menjadi penanggungjawab dari setiap wilayah kerja Puskesmas.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

Pembina Keluarga, yaitu tenaga kesehatan Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan atau memiliki pengetahuan tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Pembina keluarga bertanggung jawab mengumpulkan data kesehatan keluarga, melakukan analisis Prokesga di wilayah binaannya, melakukan koordinasi lintas program untuk intervensi masalah keluarga di wilayah binaannya, serta melakukan pemantauan kesehatan keluarga.

Jika SDM tidak cukup, dapat dilakukan Perekrutan petugas pendataan yang dilaksanakan oleh pihak Puskesmas berdasarkan pada analisis kebutuhan tenaga pendataan dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan tenaga di Puskesmas, jumlah keluarga di wilayah kerja Puskesmas, luas wilayah kerja, kondisi geografis wilayah kerja, dan pendanaan. Perekrutan petugas pendataan dapat dilaksanakan apabila hasil dari analisis kebutuhan tenaga menyatakan bahwa membutuhkan tenaga tambahan. Hal lain juga dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan melakukan dengan Poltekkes yang ada di wilayah kab/kota tersebut.

Sebagai contoh pelaksanaan integrasi SDM, petugas Kesling yang merupakan pembina keluarga (terlatih KS) saat melakukan kunjungan ke rumah untuk mengambil sampel air Rumah Tangga juga membawa Prokesga dan mampu memberikan informasi terkait TB, KB, dan secara umum 12 indikator sesuai yang telah dilatihkan.

Puskesmas juga melakukan integrasi **sumber-sumber pendanaan** yang ada di Puskesmas seperti BOK, Kapitasi, ADD, APBD, CSR dan lain-lain. Sehingga pelaksanaan pendekatan keluarga dapat dilakukan dengan menggunakan dana yang sudah teralokasi untuk membiayai pelaksanaan program yang telah ada. Misalnya pada kunjungan nifas dan kunjungan neonatus, petugas juga membawa Profil Kesehatan Keluarga untuk sekaligus melaksanakan kunjungan keluarga. Pelaksanaan kunjungan keluarga tersebut dilakukan dengan alokasi transport kunjungan rumah dari BOK untuk pemantauan kesehatan ibu nifas/neonatus. Contoh lainnya adalah, Hasil monev KBK JKN di salah satu lokasi yang dikunjungi yaitu di Puskesmas Manutapen, Kota Kupang: yang telah menerapkan setiap kunjungan sehat, baik dalam rangka PIS PK maupun kegiatan luar gedung

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

lainnya apabila sasarannya peserta JKN yang terdaftar di Puskesmas tersebut dilaporkan menjadi bagian angka kontak. Hal ini menguntungkan Puskesmas karena bukan hanya mengetahui status kesehatan penduduk di wilayahnya saja namun juga sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan kesehatan peserta JKN yg terdaftar di Puskesmas tersebut sehingga dapat mempertahankan besaran kapitasinya karena mencapai target indikator untuk KBK.

contoh pelayanan kesehatan di Puskesmas secara terintegrasi. Dimana ada peran yang dilakukan oleh Puskesmas, Dinkes kab.kota dan dinkes provinsi. Serta rumah sakit sebagai rujukan. Terkait peran tersebut maka kewajiban kepala daerah dan wakil harus melaksanakan amanat sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 dan PP Nomor 2 tahun 2018 serta Nawa Cita.

Pemerintah **Melaksanakan Program Strategi Nasional”**

Program Strategi Nasional adalah program yang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam rangka upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Nawa Cita 5“... meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui ... layanan kesehatan masyarakat...”

Sanksi Kepala dan Wakil daerah sesuai UU No 23 tahun 2014 Pasal 68 jika tidak mencapai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Walikota

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

- ❑ Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan
- ❑ Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah

Untuk itu Dinas Kesehatan Propinsi sebagai motor Penggerak Pelayanan Kesehatan di daerah harus berupaya bersama sama mewujudkan SPM agar Kinerja kepala dan wakil daerah baik

2. Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si, CA, CPMA (Inspektorat IV)



Inspktur 4 menyampaikan Hal-hal terkait Identifikasi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

1. Telah melakukan pendampingan proses barang dan jasa
 - a. Reviu terhadap harga perkiraan sendiri (HPS)
 - b. Pendampingan proses penyelesaian pekerjaan dan CCO
2. Melakukan reviu RKA-K/L
 - a. Permasalahan
 - Menu anggaran satker dekonsentrasi sudah dibuat oleh puslat SDM k namun diberikan pada saat pelaksanaan Reviu

LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK

- Penetapan target output, dan jenis pelatihan untuk satker dekonsentrasi dan kantor daerah sering terdapat perubahan dan belum ada sk penetapan dari kepala badan/kepala pusat pada saat reviu dilaksanakan
- Terdapat beberapa jenis pelatihan yang belum ada dasar/landasan hukumnya, belum ada struktur program, modul, dan kurikulum pada saat pelaksanaan reviu
- Terdapat fungsi manajemen pelatihan dan nspk yaitu tna, penyusunan bahan ajar, kurikulum, modul, dan epp yang dilakukan dan dianggarkan oleh puslat sdm dan juga oleh upt
- Terdapat upt yang mengajukan usulan anggaran untuk pelaksanaan akreditasi institusi pelatihan yang merupakan tupoksi puslat sdm kes.
- Menu anggaran untuk persiapan pelaksanaan akreditasi di upt berbeda-beda

b. Saran Tindak lanjut

- Menu anggaran terlebih dahulu dilakukan sounding dan pembahasan dengan inspektorat jenderal sebelum pelaksanaan reviu
- Sk penetapan target dan jenis pelatihan untuk dk dan kd sudah fix pada saat pelaksanaan reviu
- Jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dan dianggarkan sudah dilengkapi dasar/landasan hukumnya, belum ada struktur program, modul, dan kurikulum pada saat pelaksanaan reviu
- Puslat sdm kesehatan membuat kebijakan atau acuan untuk pemisahan fungsi nspk dan manajemen pelatihan yang dilakukan oleh puslat dan yang dilakukan oleh upt.
- Atau puslat sdm menarik seluruh fungsi nspk dan anggarannya ke puslat sdm kes.
- Puslat sdm kesehatan menarik seluruh anggaran pelaksanaan akreditasi institusi ke bidang akreditasi; atau

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

- Membuat standar menu anggaran untuk persiapan akreditasi institusi untuk upt.
- 3. Review Laporan keuangan, beberapa temuan terkait agaran pelaksanaan yang tidak sesuai dengan SBM, temuan pengadaan barang dan jasa, temuan penyelenggaraan diklat yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- 4. Untuk itu hal-hal inilah yang harus diperbaiki tahun kedepan agar baik kualitas kegiatan baik dan evaluasi anggaran juga baik.

3. Nusli Imansyah, SKM, M.Kes (Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan)



Menyampaikan **Penyelenggaraan Pelatihan PIS-PK tahun 2018**

realisasi pelatihan keluarga sehat yang telah dilaksanakan hingga tahun 2018

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

NO	TAHUN	TARGET (orang)	PENCAPAIAN	% REALISASI	PUSKESMAS
1	2016	5.000	4.116	82,32%	274
2	2017	14.630	16.516	112,89%	3.317
3	2018	14.560	13.225	90,83%	2.699

REALISASI PELATIHAN MANAJEMEN PUSKESMAS 2016-2018
BERDASARKAN KETERSEDIAAN ANGGARAN DEKON DAN APBN UPT

NO	TAHUN	TARGET (orang)	PENCAPAIAN (orang)	% REALISASI	PUSKESMAS
1	2016	1.268	548	43,22%	274
2	2017	6.710	6.660	99,25%	3.330
3	2018	4.550	4.460	98,02%	2.230

Menyampaikan bahwa acuan kurikulum adalah sebagai acuan dari pelatihan, karena untuk pelatihan baik pelatihan keluarga sehat dan pelatihan manajemen puskesmas telah dilakukan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) maka kurikulum pelatihan telah mengalami perubahan sesuai dengan rekomendasi dalam EPP.

Pelatihan bersumberdana dekon sebaiknya bisa menjadi perlakuan agar daerah melaksanakan dan mendorong sumber dana APBD melakukan kegiatan yang serupa untuk mempercepat tercapainya total coverage dalam pelatihan sehingga Implementasi yang diharapkan juga akan cepat terlaksana dengan SDM Kesehatan yang lebih memadai dan sesuai kebutuhan.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

Menyampaikan sosialisasi untuk soal pelatihan semi online, khusus untuk pelatihan Manajemen Puskesmas dan Pelatihan TKHI dan nantinya untuk pelatihan lainnya.

4. I Made Suwitra

Menyampaikan terkait pelaksanaan pelatihan di Bali baik pelaksanaan teknis dan capaian anggaran, selain itu menyampaikan capaian untuk implementasi PIS-PK di wilayah kerjanya.

1.5. PEMAPARAN HARI KEDUA (16 November 2018)

Narasumber yang mengisi hari kedua kegiatan Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan PIS-PK ini yaitu:

1. dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS

Health in For all Policy menyampaikan tentang Kesehatan dalam Semua Kebijakan: Kerangka Aksi Negara.

HiAP adalah pendekatan tentang hak dan kewajiban terkait kesehatan. Ini meningkatkan keterjangkauan pembuat kebijakan untuk dampak kesehatan di semua tingkat pembuatan kebijakan. Ini termasuk penekanan pada konsekuensi dari kebijakan publik pada sistem kesehatan, faktor penentu kesehatan, dan kesejahteraan. Ini juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan Pelatihan untuk tahun ke tiga pada 2019 diharapkan telah selesai dan semua Puskesmas telah melaksanakan kunjungan rumah, identifikasi masalah, implementasi program sesuai dengan masalah dan maintenance.

Selain hal tersebut juga menyampaikan pelatihan yang berkaitan dengan Rumah Sakit jika dikaitkan dengan standar kompetensi yang sedang disusun oleh bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan maka pada bulan september telah dilaksanakan workshop dan pengisian instrument standar kompetensi oleh pimpinan 110 rumah sakit regional dan dibantu oleh TIM dari Universitas Indonesia.

**2. Dedeh Sya'adah, SKM, M.K.M (Kepala Bidang Analisis
Kompetensi dan Pemetaan Kebutuhan Pelatihan)**

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**



Menyampaikan **STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (SK3APDN)**

Hal-hal yang mendasari stansar kompetensi

1. UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
2. UU No 5 tahun 2014 tentang ASN
 - a. pasal 21 PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi
 - b. Pasal 70 berbunyi :
 - Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
 - Dalam mengembangkan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing;
3. PP No 11 tentang Manajemen PNS pasal 54, 55 dan 166
 - Yang dimaksud dengan **standar kompetensi** disini adalah Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

- Yang mempunyai tujuan ; Menjamin kualitas ASN melalui penetapan kemampuan dasar untuk setiap jabatan; Menjamin obyektifitas penyelenggaraan manajemen ASN dengan mengedepankan prinsip **Merit**; Menyediakan landasan untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan manajemen ASN yang berbasis kompetensi.

Pada akhirnya dengan adanya pengembangan kompetensi dan profesionalitas keahlian aparatur pemerintahan dalam negeri urusan kesehatan sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara akuntabel, professional dan berintegritas.

Selain itu SK3 APDN urusan kesehatan ini bertujuan untuk mengembangkan SDM yang bergerak dalam bidang keahlian kesehatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak, diantaranya:

Bagi Insitusi pendidikan : 1) memberikan informasi untuk opengembangan program kurikulum berbasis kompetensi, 2) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penmilaian dan sertifikasi profesi keahlian.

Bagi Pemerintah daerah serta pengguna Aparatur : 1) membantu dalam rekrutmen aparatur yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi; 2) membantu pelaksanaan penilaian unjuk kerja; 3) mengembangkan program pelatihan berdasarkan kebutuhan; 4) sebagai dasar untuk membuat uraian jabatan.

Bagi Institusi Penyelenggara Pengujian dan sertifikasi ; 1) sebagai acuan dalam merumuskan skema sertifikasi sesuai kualifikasi dan levelnya; 2) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

Maka penetapan standar kompetensi menjadi penting. Termasuk untuk pelaskanaan di dinas kesehatan provinsi dan jajarannya.

3. Usman Sumantri (Kepala Badan PPSDM Kesehatan)



Beliau menyampaikan **PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA PUSKESMAS DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM MENDUKUNG PIS-PK**

Hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Tantangan dan peluang era revolusi industry 4.0
2. Strategi Indonesia menghadapi Revolusi Industri 4.0
3. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan pada Revolusi Industri 4.0
4. Kesimpulan
 - a. Revolusi Industri 4.0 memberikan dampak dan pengaruh luar biasa pada pelayanan kesehatan dan pengembangan SDM Kesehatan
 - b. Pengaruh Revolusi Industri 4 terhadap pelayanan kesehatan akan menuntut kemampuan SDM di bidang IT selain penguasaan substansi profesi.
 - c. Tenaga kesehatan adalah profesi yang pengetahuan dan keterampilannya harus selalu diupdate secara berkesinambungan untuk menjamin pelayanan

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

- d. Pengembangan kompetensi SDM yang diamanatkan oleh UU No. 5 tahun 2014 dan PP 11 tahun 2017 harus mengikuti RI 4.0
- e. Penyesuaian metode pengembangan kompetensi SDM diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi ke arah E-Learning melalui wadah Corporate University

Marilah manfaatkan teknologi untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan.

4. dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes (Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan)

Permasalahan pelatihan Dekonsentrasi

Pelatihan Keluarga Sehat

- Kurangnya efektif jumlah pelaksanaan pelatihan 3 hr untuk 30 jpl
- Padatnya jadwal kegiatan Penceramah Pusat (Pejabat eselon I dan II) untuk membuka dan memberikan materi kebijakan KS, sehingga tidak semua angkatan dapat jadwal
- Terbatasnya dana perjadin Pusdatin, sehingga tidak semua pelatihan KS dilakukan money aplikasi KS oleh pusdatin
- Data puskesmas yang akan mengikuti pelatihan yang dikeluarkan oleh pusat berbeda dengan data puskesmas yang direncanakan oleh dinkes kab/kota sehingga kabupaten kesulitan untuk merealisasikan kegiatan pendataan KS di kab/kota

Pelatihan Manajemen Puskesmas

- Kurangnya jumlah fasilitator yg telah mengikuti TOT manajemen Puskesmas
- Peserta pelatihan yang tidak menguasai bidang kesehatan, menyulitkan proses diskusi
- Waktu pelatihan yang bersamaan dgn pelaksanaan akreditasi Puskesmas shg Puskesmas lokus yg ada di Permenkes tdk dpt mengikuti pelatihan
- Data puskesmas yang akan mengikuti pelatihan yang dikeluarkan oleh pusat berbeda dengan data puskesmas yang direncanakan oleh

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

dinkes kab/kota sehingga kabupaten kesulitan untuk merealisasikan kegiatan pendataan KS di kab/kota

- Puskesmas tdk memiliki data KS shg tdk bs berproses dlm penugasan
- Padatnya jadwal pelatihan dari Bapelkes, shg sering berubah
- Tidak terserapnya anggaran Narasumber Pusat (Perjadin) krn padatnya jadwal

5. Drs. M. Royan, M.Kes (Kepala Bidang Pengendalian Mutu)



Pak royan Menyampaikan ; **KEBIJAKAN AKREDITASI PELATIHAN DAN INSTITUSI PELATIHAN KESEHATAN**

Sebagai dasar pelaksanaan Akreditasi adalah peraturan sebagai berikut

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 31 (2):Pelatihan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan Standar Profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia no.5 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah
- Permenkes No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 817

Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan terdiri dari :

- a. Subbidang Akreditasi Pelatihan; dan
- b. Subbidang Akreditasi Institusi Pelatihan

Merujuk pada peraturan tersebut maka pelatihan harus diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi, sedangkan pelatihan yang dana dekonsentrasi di dinas kesehatan maka sebagai unit penyelenggaraannya adalah Balai Pelatihan Kesehatan Daerah sedangkan yang belum mempunyai maka dapat menggunakan pengampu.

Selain hal tersebut juga pak royan menyampaikan pengajuan akreditasi pelatihan dengan melalui website yang rencananya akan di terapkan mulai bulan maret 2019.

**6. Roostiasti SW., SKM, M.K.M (Kepala Sub Bidang
Pengmbangan Pelatihan Teknis)**

Menyampaikan Sosialisasi Penyelenggaraan Ujian Komprehensif Pelatihan Manajemen Puskesmas.

Adapaun hal pertama yang dilakukan oleh penyelenggara sebagai berikut : Pendaftaran Institusi, Peserta mendaftar sebagai user, Donwload soal, Upload Jawaban.

Untuk contoh Pendaftaran Institusi

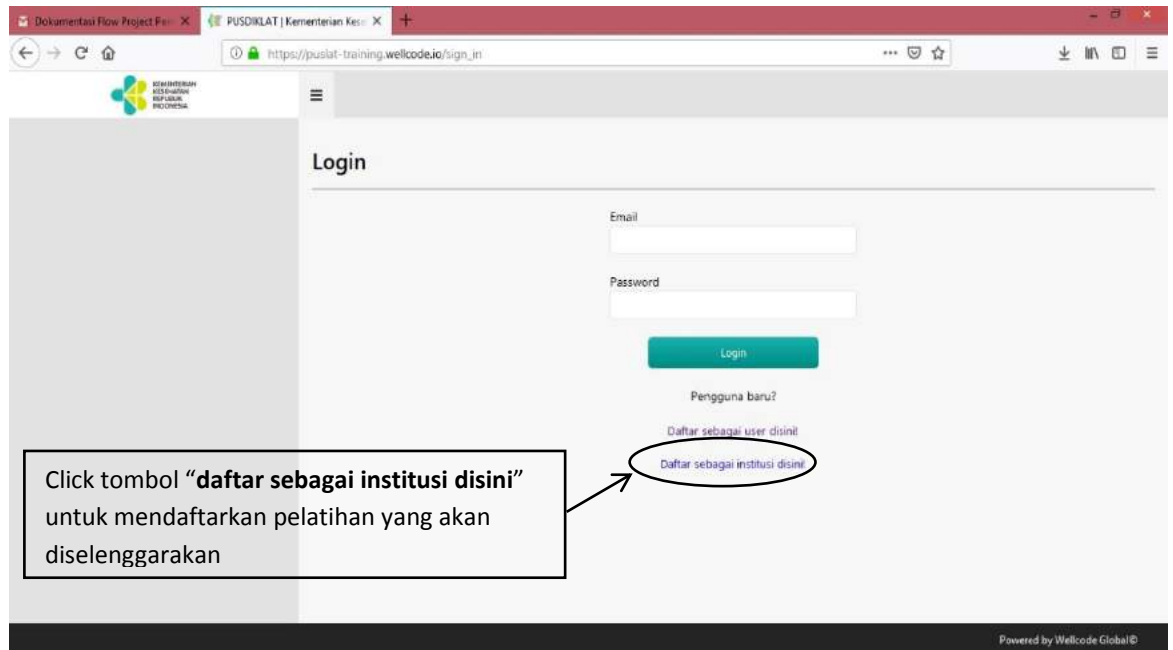
penyelenggara pelatihan dalam hal ini BBPK/Bapelkes/Bapelkesda sudah mendaftarkan institusinya dengan langkah langkah berikut ini :

1. Penyelenggara melakukan pendaftaran melalui website ***puslat-training.wellcode.io*** sebagai institusi pelatihan. Institusi pelatihan/

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

penyelenggara pelatihan menentukan admin yang akan bertanggung jawab untuk mengoperasikan aplikasi pelatihan berbasis web.

2. Buka browser Mozilla Firefox/ Google Chrome, kemudian ketik alamat berikut : https://puslat-training.wellcode.io/sign_in, kemudian Institusi / Penyelenggara Pelatihan mengajukan pendaftaran pelatihannya.



Hal-hal lain telah tertuang dalam manual book yang rencananya akan diedarkan April 2019, saat ini masih dalam proses ujicoba dan penyempurnaan.

7. Dra Euis Maryani, M.Kes (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)



Menyampaikan Paparan terkait hal-hal yang harus dilakukan oleh para peserta workshop PIS-PK adalah sebagai berikut :

- a.** Data Realisasi Target dan Anggaran TA. 2018
- b.** Data Biodata Pelatihan Tahun 2016-2019 sesuai dengan format
- c.** Data Rekap Puskesmas yang telah dilatih Manajemen Puskesmas dan Pelatihan Keluarga Sehat serta data pelatihan dekon lainnya
- d.** Data Lokus Puskesmas yang akan dilatih tahun 2019

Apakah sudah sesuai dengan yang telah dipaparkan sebelumnya, lokus sasaran untuk tahun 2019 untuk pelatihan keluarga sehat diselesaikan sesuai dengan roadmap yang telah ada.

1.6. DISKUSI KELOMPOK

Sesi diskusi ini mengenai Data Pelatihan mulai tahun 2016 s.d 2018 baik peserta, anggaran dan hal lain yang terkait menjadi capaian indicator dari dana pelatihan bersumber dekonsentrasi.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**



**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**



1.7. SESI TANYA JAWAB

Pada sesi ini peserta melakukan tanya jawab kepada narasumber mengenai tantangan kedepan terkait standar kompetensi, pelatihan

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

terkait dengan pengampuan dan pelaksanaan ujian komprehensif semi online dan akreditasi pelatihan berbasis website.



1. Peserta dari Sulbar menanyakan terkait pengampuan, selama ini sebagai pengampu adalah BBPK makassar, apakah jika fasilitasi harus menyediakan dana quality control (QC) ? Bagaimana dengan pelatihan dana APBD yang minta difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

Terkait pembiayaan terutama untuk yang dana APBD terkadang tidak mencukupi jika harus ada QC nya ? bagaimana solusinya?

2. Jawa Timur Menanyakan, terkait sudah BLUD maka pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan dana dekon apakah memungkinkan untuk menyamakan dana dekon sesuai dengan Tarif BLUD,

Jawab ; BLUD menggunakan aturan dari Gubernur sementara dana dekonsentrasi merujuk pada perauran kementerian keuangan, secara tatanan peraturan yang lebih tinggi yang digunakan.

UPT latkesmas Jawa Timur minta untuk tidak melakukan pengampuan pada tahun 2019 sebelum jelas peraturannya, karena jika yang memfasilitasi harus biaya sendiri, maka latkesmas tidak ada anggaran tersebut,

**LAPORAN PELAKSANAAN
PERTEMUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN &
KOORDINASI PIS-PK**

Sesuai dengan pedoman maka semua biaya untuk fasilitasi menjadi tanggungan dari pemohon fasilitasi, hal hal lain yang belum terakomodir akan disampaikan lebih lanjut.



3. Akreditasi Pelatihan dan soal online bagaimana, kapan akan dilakukan sosialisasi. Terkait Jawa Barat yang jumlah puskesmas masih banyak yang belum dilatih kemungkinan baru tahun 2020 baru bisa terselesaikan.

Jawa Barat memang pada tahun 2016 hanya melaksanakan 5 angkatan dan selebihnya tidak laksana terkendala dengan lelang terkait konsumsi.



1.8. RENCANA TINDAK LANJUT

Hal-hal yang harus ditindaklanjuti dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut :

1. Lokus/sasaran puskesmas yang belum dilatih akan dianggarkan pada tahun 2019
2. Untuk pelatihan bersumberdana dekonsentrasi semua mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pusat pelatihan SDM kesehatan. Sehingga tidak terulang kembali terkait peserta pelatihan yang tidak sesuai kriteria pelatihan dan jumlah JPL yang tidak sesuai.
3. Bagi Dinas Kesehatan yang tidak memiliki Balai pelatihan maka harus diampu oleh institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi Penyelenggara pelatihan minimal B Seperti BBPK, Bapelkes UPT Pusat, Bapelkes Daerah.
4. Penyelenggara pelatihan harus mengajukan permohonan akreditasi pelatihan kepada kepala pusat pelatihan SDM kesehatan dengan melampirkan : 1) SK penyelenggara Pelatihan, 2) SK/Surat tugas MOT, 3) Surat Kesediaan mengampu, 4) jadwal pelatihan yang mencantumkan nama fasilitator permateri, 5) Komponen pelatih/fasilitator, 6) kerangka acuan pelatihan , 7) evaluasi Peserta/ pelatih/penyelenggara, 8) Panduan PKL jika Ada Praktik Lapangan
5. Pengajuan Akreditasi pelatihan diajukan 1 bulan sebelum pelaksanaan pelatihan. Usulan Akreditasi pelatihan dapat disampaikan melalui email evapor_pusdiklat@yahoo.com dan mulai bulan maret diajukan via website.

1.9. ACARA PENUTUPAN

Setelah serangkaian acara yang telah dilaksanakan, kegiatan Workshop Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan dan Koordinasi PIS-PK ini ditutup oleh a.n Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Bapak **Nusli Imansyah, SKM,M.Kes.**



BAB 3

PENUTUP

Dalam Penyelenggaraan Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan dan Koordinasi PIS-PK yang diadakan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, secara keseluruhan berjalan dengan baik dan tertib.

Dengan diadakannya Workshop Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan dan Koordinasi PIS-PK diharapkan dapat mewujudkan Pelatihan yang berkualitas merujuk pada kurikulum yang telah ditetapkan, pelatihan bersumber dana dekonsentrasi mengikuti aturan kementerian keuangan sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang telah ditetapkan.

Sehingga pelatihan menghasilkan SDM Kesehatan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi transformasi dalam era 4.0 dan dapat mendukung mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Masukan dan koreksi dari semua pihak sangat kami perlukan demi perbaikan dimasa mendatang. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kesuksesan acara ini. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terimakasih